

ANALISIS KESESUAIAN HUKUM DALAM PROSES PENUNJUKAN LANGSUNG PADA PROYEK JALAN TOL SUMATERA HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Intisari

Oleh

Muh. Erry Sugiharto¹ dan Mailinda Eka Yuniza²

Tujuan yang diharapkan oleh penulis penelitian ini adalah Untuk mengetahui kesesuaian hukum yang diterapkan dalam proses penunjukan langsung dalam pengadaan jalan tol trans Sumatera.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung dengan data empiris. Dimana menurut Soerjono Soekanto³ penelitian hukum normatif terdiri dari: a) Penelitian terhadap asas-asas hukum; b) Penelitian terhadap sistematika hukum; c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, dan e) Penelitian perbandingan hukum. Dikarenakan metode penelitian ini menggunakan pendekatan data empiris sebagai pendukung, sehingga akan didasarkan pada data yang terkumpul dari bahan-bahan pustaka (data sekunder) dan lapangan (data primer/data dasar).

Dalam rangka efektivitas pekerjaan dan memenuhi tanggung jawab terhadap percepatan pembangunan jalan tol Sumatera, PT Hutama Karya (Persero) menunjuk anak perusahaan melalui Rapat Direksi yaitu Hutama Karya Infrastruktur dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi Jalan Tol di Sumatera sebagaimana yang telah tercantum dalam putusan Direksi Nomor : SP/PHH.1319B/RIS-RPT/41B-2015/ (*terlampir*). Sesuai dengan undang-undang No. 2 tahun 2017 menjelaskan, bahwa untuk mengefisienkan pelaksanaan pengadaan jalan tol Sumatera, yang apabila tidak dilakukan akan berdampak pada gagalnya tujuan percepatan pembangunan jalan tol Sumatera.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance* (GCG), Pengadaan Barang dan Jasa, Penunjukan Langsung

¹ Kepala Wilayah pada Kantor PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Kalimantan

² Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (Pembimbing Akademik)

³ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm 51

**ANALYSIS OF LEGAL ADJUSTMENT IN DIRECTLY APPOINTMENT
PROCESS ON TREATMENT PROJECT TOL SUMATERA HUTAMA
INFRASTRUCTURE WORK ON RELATED INFORMATION**

ABSTRACT

By

Muh. Erry Sugiharto⁴ and Mailinda Eka Yuniza⁵

Abstract

Objectives expected by the authors of this study is To determine the conformity of the law applied in the process of direct appointment in the procurement of trans-Sumatra toll road.

This research is a normative research supported by empirical data. Where according to Soerjono Soekanto normative legal research consists of: a) Research on legal principles; b) Research on legal systematics; c) Research on the level of legal synchronization, and e) Comparative study of law. Because of this research method empirical data approach, so it will be based on data collected from library materials (secondary data) and field (primary data / basic data).

In the framework of the effectiveness of the work and fulfill the responsibility for the acceleration of the construction of the Sumatera toll road, PT Hutama Karya (Persero) appoints a subsidiary through the Board of Directors' Meeting namely Hutama Karya Infrastruktur in carrying out Toll Road construction work in Sumatera as stated in the decision of Board of Directors Number SP / PHH.1319B / RIS-RPT / 41B-2015 / (attached). In accordance with the law no. 2 year 2017 explains, that to streamline the implementation of Sumatera toll road procurement, which if not done will have an impact on the failure of the acceleration of development of Sumatera toll roads

Keywords: *Good Corporate Governance (GCG), procurement of goods and services, Direct Appointment*

¹Head of the region at the office of PT. Hutama Karya (Persero) area III Borneo

²Vice Dean for Research, Community Service Faculty of Law Gadjah Mada University, Yogyakarta (Academic Advisor)

³Soerjono Soekanto, 2006, *Introduction to Legal Research* , UI-Press, Jakarta, hlm 51